

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sosial ekonomi yang sudah lama menjadi permasalahan yang krusial bagi Indonesia salah satunya adalah kemiskinan, yang seharusnya segera mendapatkan penanganan yang baik dan tepat agar masalah kemiskinan dapat teratasi. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keadaan kebutuhan, keterbatasan dan kelemahan di bidang kehidupan, bisa dilihat dari total masyarakat miskin yang tinggi dan mayoritas berada di wilayah pedesaan, minimnya keahlian masyarakat mengakses lapangan kerja dan kurangnya kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, tidak di daerah pedesaan saja tetapi di daerah kota besar juga masih banyak terdapat masyarakat miskin. Jika tidak mempunyai pengasilan dan modal untuk mencapai keperluan mendasar seperti konsumsi, pakaian, rumah, tingkat kesehatan dan pendidikan adalah penyebab dari kemiskinan. Dikutip dari dokumen bank Dunia yang berjudul “*June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)*”, Bank Dunia telah merevisi perhitungan garis kemiskinan global dengan mengganti acuan dari Purchasing Power Parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021, yang dirilis oleh *International Comparison Program* pada Mei 2024. Pergantian ini menyebabkan perubahan pada tiga kategori garis kemiskinan global karena perbedaan metode konversi daya beli antarnegara antara PPP 2017 dan PPP 2021. PPP digunakan untuk membandingkan harga barang dan jasa serupa di berbagai negara dengan menyesuaikan perbedaan daya beli, bukan berdasarkan nilai tukar pasar saat ini, melainkan berdasarkan paritas daya beli. Akibat pembaruan tersebut, batas garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah naik dari 3,65 menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari, sementara pada negara berpendapatan menengah atas meningkat dari 6,85 menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari. Dampaknya, jumlah penduduk miskin di berbagai negara dan wilayah meningkat signifikan. Secara global, angka penduduk miskin pada Juni 2025 mencapai 838 juta orang atau 10,5 persen dengan perhitungan PPP 2021, meningkat dibandingkan perhitungan PPP 2017 yang sejumlah 134 juta orang atau 27,3 persen pada September 2024.

Menurut Todaro dalam (Isnaini & Nugroho, 2020) perbedaan kemiskinan di setiap negara berkembang karena aspek ini:

1. Keadaan wilayah, disparitas populasi penduduk dan skala penghasilan
2. Keadaan riwayat hidup, beberapa wilayah masih dikuasai oleh negara yang lain
3. Ketidaksamaan potensi lingkungan dan potensi penduduk
4. Adanya disparitas fungsi industri negara dan swasta
5. Kurangnya peran perusahaan
6. Ketidaksamaan tingkat keterikatan kepada ekonomi yang lebih kuat dan politik di negara lain
7. Perbedaan pemindahan wewenang, sistem politik dan lembaga dalam negeri.

Pulau Sumatera, yang mencakup sepuluh provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, serta Bangka Belitung menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk yang sangat besar, yang semakin dipengaruhi oleh arus migrasi dan urbanisasi. Jumlah penduduk yang tinggi memberikan tekanan terhadap ketersediaan infrastruktur dan lapangan kerja, yang sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, sementara peluang kerja yang tersedia tidak sebanding, sehingga memicu masalah pengangguran. Di sisi lain, jika penduduk yang besar tersebut tidak mempunyai kualitas sumber daya manusia yang memadai, maka hal ini akan menjadi beban pembangunan dan berpotensi memperparah tingkat kemiskinan di kawasan Sumatera. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Berikut adalah tabel Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Pulau Sumatera.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Pulau Sumatera Tahun 2024

Wilayah	Kemiskinan (Jiwa)	IPM (%)	Tk. Pengangguran (%)	PE (%)	Upah Minimum (Rp)
Provinsi Aceh	804.530	75,36	5,75	5,17	3.460.672
Provinsi Sumatera Utara	122.801	74,02	5,6	4,95	2.809.915
Provinsi Sumatera Barat	345.730	76,43	5,75	4,33	2.811.449
Provinsi Riau	255.600	74,79	3,7	3,37	3.294.625
Kep.Riau	138.300	77,97	6,3	5,02	3.402.492
Sumatera Bagian Utara	1.666.961 (34%)	75,71	5,41	4,56	3.155.830
Provinsi Jambi	256.420	73,43	4,45	4,25	3.037.121
Provinsi Sumatera Selatan	984.240	72,3	3,97	4,96	3.456.874
Provinsi Bengkulu	281.360	73,39	3,17	4,7	2.507.079
Provinsi Lampung	941.230	71,81	4,12	4,8	2.716.497
Kep. Bangka Belitung	699.500	73,33	3,85	1,03	3.640.000
Sumatera Bagian Selatan	3.171.750 (66%)	72,85	3,91	3,94	3.071.571

Sumber: BPS sebagai Provinsi (diolah)

Table 1.1 menjelaskan bagaimana kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum yang ada di pulau sumatera pada tahun 2024. Dilihat dari tingkat kemiskinan, Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu 984.240 jiwa, sedangkan untuk tingkat kemiskinan paling rendah adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu 122.801. Untuk tingkat IPM paling tinggi adalah Kep. Riau dengan angka 77,97 persen, sedangkan provinsi paling rendah angka IPM nya adalah Provinsi Lampung dengan angka 71,81 persen. Dilihat dari tingkat pengangguran, provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi adalah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat diangka 5,75 persen, dan provinsi dengan tingkat pengangguran paling rendah adalah Provinsi Bengkulu diangka 3,17 persen. Dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu 5,17 persen, sedangkan provinsi paling rendah tingkat pertumbuhannya adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan angka 1,03%. Terakhir dilihat dari upah minimum, provinsi dengan tingkat UMR paling

tinggi adalah Kep. Bangka Belitung yaitu Rp. 3.640.000, sedangkan provinsi dengan tingkat UMR paling rendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu Rp. 2.507.079.

Dikutip dari Ruang Energi.com dan Enimekspres-Disway yang menerangkan bagian wilayah dari pulau Sumatera antara lain adalah Sumatera bagian utara dengan 5 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kep. Riau. Sedangkan Sumatera bagian selatan dengan 5 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Kep. Bangka Belitung. Dilihat melalui tingkat kemiskinan, Sumatera Bagian Selatan mempunyai persentase kemiskinan lebih tinggi diangka 66 persen dibandingkan Sumatera Bagian Utara dengan angka 34 persen. Sumatera Bagian Selatan dengan lima Provinsi mempunyai sumber kekayaan yang melimpah, mulai dari kekayaan potensi manusianya, kekayaan alam yang beragam dan lain sebagainya. Dari potensi yang sangat banyak ini, tentu saja Sumatera Bagian Selatan akan memberikan keuntungan bagi Sumatera Bagian Selatan seperti dari tiga bidang yang terbaik yaitu, bidang perdagangan, pertanian dan yang terutama adalah bidang pertambangan yang berupa gas yang sangat dikenal dari Sumatera Bagian Selatan, dimana ada banyak industri-industri besar yang mengelola pertambangan tersebut. Jadi permasalahan inilah yang membuat masalah Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan penting untuk dianalisis, dengan lima Provinsi yang mempunyai kekayaan yang berlimpah dan dengan sektor yang unggul di wilayah tersebut kurang mampu untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di Sumatera Bagian Selatan menjadi lebih baik.

Tingkat Kemiskinan sangat ditentukan oleh banyak sekali faktor dan indikator pembangunan, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum memiliki kaitan langsung dengan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia adalah faktor penting untuk kesejahteraan ekonomi sebuah wilayah. Kian besarnya pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah, semakin baik pula kualitas pembangunan manusianya. Perkembangan ekonomi yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan sektor ekonomi dapat membantu meningkatkan nilai pembangunan manusia di wilayah tersebut. Karena

pembangunan manusia sangat didukung dengan adanya pertumbuhan ekonomi. (Rosyadah, 2021). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia semestinya akan dapat mengurangi angka kemiskinan, dengan adanya kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang memadai. Kemiskinan dipacu langsung oleh Indeks Pembangunan Manusia sebab bernilai negatif, yang didukung oleh penelitian Nurine Syarafina Khawaja Chisti pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.

Tingkat nilai terendah dan tertinggi untuk ukuran yang terkandung sebagai aspek Indeks Pembangunan Manusia, antara lain:

- a. Rata-rata Lama Usia Hidup : 20 – 85 Tahun (standar BPS)
- b. Harapan Lama Sekolah : 0 – 18 Tahun (standar BPS)
- c. Angka Rata-rata Lama Sekolah : 0-15 Tahun (standar BPS)
- d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan : Rp 1.007.436 – Rp 26.572.352.

Nilai IPM berkisar antar 0 sampai 80. Semakin mendekati nilai 80, alhasil IPM terindikasi semakin baik.

Mengacu pada nilai IPM, BPS mengatur tingkat pembangunan manusia suatu daerah pada empat tingkatan, diantaranya:

- a. IPM kurang dari 60 = IPM Rendah
- b. Dari angka 60-69 = IPM Sedang
- c. Dari angka 70-79 = IPM Tinggi
- d. Angka IPM lebih dari 80 = IPM Sangat Tinggi

Tingginya tingkat penduduk akan mempengaruhi tawaran kuantitas tenaga kerja yang tidak disertai dengan peluang kerja yang ada, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan tantangan yang dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu kesulitan untuk mengendalikan tingkat pengangguran. Meskipun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan, namun dalam beberapa tahun terakhir, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan yang tersedia belum cukup untuk menerima angkatan kerja yang terus berkembang. Hal tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Pengangguran dapat diakibatkan oleh adanya kesenjangan antara jumlah pekerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada, serta keterbatasan

keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja, yang juga berkontribusi pada fenomena *underemployment*. Pengangguran merupakan isu serius yang dapat berdampak negatif baik pada perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dapat memicu masalah seperti kemiskinan, kejahatan, dan gangguan sosial lainnya. Dengan memaksimalkan kemampuan tenaga kerja yang ada, Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi ini tidak sekedar dapat meminimalisir tingkat pengangguran, tetapi juga memperluas kesempatan kerja yang ada, memperbaiki efisiensi penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. (Prakoso, 2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni ukuran yang dipergunakan dalam menilai jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung oleh pasar kerja, yang mencerminkan ketidaktergunaan optimal dari pasokan tenaga kerja yang tersedia. (Statistik, 2024). Dari penelitian Muhammad Ersad, Amri Amir, dan Zulgani menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh pada pendapatan di Sumatera Bagian Selatan, yang artinya juga mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui pendapatan tersebut. Penelitian dari Bagus Haryo Kusumo menyatakan bahwa pengangguran dampak yang signifikan pada kemiskinan di Jawa Tengah.

Selain tingkat pengangguran pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak pada tingkat kemiskinan suatu daerah, yang ditunjukkan melalui kenaikan PDRB, Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penting untuk memperhitungkan aspek pembangunan manusia, terutama pada konteks ekonomi daerah, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang bermutu, kinerja ekonomi diharapkan akan lebih optimal. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat penting untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ekonomi yang tumbuh akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, yang pada gilirannya menjadi penghubung antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Secara sederhana, pembangunan manusia mencakup unsur produksi, distribusi berbagai komoditas, serta pemanfaatan potensi manusia. Dengan adanya pembangunan manusia yang berkualitas, tingkat kemiskinan pun diharapkan dapat berkurang secara signifikan. (BPS, 2017). Pertumbuhan ekonomi secara langsung juga

mempengaruhi tingkat kemiskinan karena bernilai positif, yang didukung oleh penelitian Nurine Syarafina pada 6 Provinsi di Pulau Jawa. Nadia Ika Purnama dalam penelitiannya juga mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi berdampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pekerja miskin, dengan cara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. (Ayu & Faisal, 2021). Menurut PERMENAKER No. 01 Tahun 1999, upah minimum ialah jumlah upah terendah pada pekerja yang bermasa kerja di bawah satu tahun, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Penentuan upah minimum dijalankan di tingkat kabupaten/kota, berdasarkan usulan Dewan Pengupahan dan pertimbangan kesejahteraan pekerja serta kondisi ekonomi daerah, dengan indikator seperti PDRB dan TPAK. (Sutama et al., 2019). Melalui penelitian Nurine Syarafina bahwa upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan, Hal ini disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan penerapan upah minimum yang sekedar berlaku di sektor formal.

Menurut penelitian terdahulu oleh (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018) yang melakukan penelitian terkait “Analisis Pengaruh Indeks Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi kasus pada 6 Provinsi di Pulau Jawa)”. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya ada pada rentang waktu yang lebih panjang, yaitu mencakup sepuluh tahun dari 2015 hingga 2024, serta fokus wilayah yang spesifik pada lima provinsi di Sumatera Bagian Selatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel.

Dari pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengangkat topik tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan (di Sumatera Bagian Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang disusun menurut latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan:

1. Bagaimana dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui mempertimbangkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu seperti berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini mampu dipergunakan menjadi landasan bagi pemerintah daerah guna merancang kebijakan yang lebih efisien untuk memperbaiki IPM, mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan upah minimum, serta mengurangi tingkat pengangguran.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara, tingkat Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum pada tingkat kemiskinan, serta memberikan perspektif baru dalam kajian pembangunan dan penelitian ini dapat dijadikan materi ajar dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi pembangunan, sosial, dan kebijakan publik, membantu mahasiswa memahami isu-isu kompleks dalam pembangunan masyarakat.